

STRATEGI PEMERINTAH DESA UNTUK MENINGKATKAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN DESA (Studi di Desa Talawid Kecamatan Siau Barat Selatan Kabupaten Siau Tagulandang Biaro)

Meisy M. P. Bidara^{1,*}, Wiesje F. Wilar², Trintje Lambey³

^{1,2,3} Program Studi Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Sam Ratulangi

*Corresponding author: meissybidara@gmail.com

ABSTRAK

Partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan desa sangat penting untuk menumbuhkan rasa memiliki terhadap hasil dari pembangunan yang dilakukan. Untuk meningkatkan partisipasi masyarakat juga tergantung dari peran pemerintah desa. Dengan menggunakan metode kualitatif, artikel ini mengkaji strategi yang dilakukan oleh pemerintah Desa Talawid, Kecamatan Siau Barat Selatan, Kabupaten Siau Tagulandang Biaro. Dalam mengkaji strategi pemerintah desa, digunakan pendekatan yang dikemukakan oleh Fred R. David (2011), tentang proses manajemen strategi. Menurutnya manajemen strategi terdiri atas tiga tahap yaitu: Perumusan strategi, penerapan strategi, dan penilaian strategi. Temuan penelitian menggambarkan bahwa dari sisi perumusan strategi pemerintah Desa Talawid sudah cukup baik, sedangkan saat implementasi strategi masih terdapat beberapa hambatan yaitu kurangnya koordinasi antar unit yang sudah dibentuk.

Kata Kunci: Strategi; Pemerintah Desa; Partisipasi Masyarakat; Pembangunan Desa

ABSTRACT

Community participation in the village development process is very important to foster a sense of belonging to the results of the development carried out. Increasing community participation also depends on the role of the village government. Using a qualitative method, this article examines the strategy carried out by the government of Talawid Village, South West Siau District, Siau Tagulandang Biaro Regency. In reviewing village government strategies, the approach proposed by Fred R. David (2011), regarding the strategic management process is used. According to him, strategic management consists of three stages, namely: Strategy formulation, strategy implementation, and strategy assessment. The research findings illustrate that in terms of strategy formulation the Talawid Village government is quite good, while during the implementation of the strategy there are still several obstacles, namely the lack of coordination between the units that have been formed.

Keywords: Strategy; Village government; Society participation; Village Development

PENDAHULUAN

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang mengatur dan mengurus masyarakat setempat berdasarkan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Indonesia. Desa berada di bawah pemerintahan kabupaten, dalam pengelolaannya menggunakan konsep desentralisasi. Keberadaan desa di Indonesia diatur dengan undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa dan aturan pelaksanaannya yaitu Peraturan Pemerintah nomor 43 tahun 2014 tentang pelaksanaan Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa, disebutkan dalam Pasal 1 angka 1 bahwa desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa

masyarakat hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pembangunan adalah suatu proses yang dilakukan secara terus menerus, dilaksanakan secara bertahap dan berencana yang memiliki orientasi pada suatu pertumbuhan dan perubahan yang lebih baik dari keadaan sebelumnya serta mencakup seluruh aspek kehidupan baik lahiriah dan batiniah (Siagian, 2012). Secara umum, pembangunan terdiri dari dua bentuk yaitu pembangunan fisik dan pembangunan non fisik. Pembangunan fisik adalah pembangunan yang dilaksanakan untuk menyediakan berbagai sarana dan prasarana umum yang dibutuhkan oleh masyarakat seperti gedung, jalan, saluran irigasi dan infrastruktur lain. Sedangkan pembangunan non fisik adalah pembangunan yang berkaitan dengan penggunaan sumber daya manusia itu sendiri (Tarsila, 2015).

Berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014, kewenangan Pemerintah daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya sesuai dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pemerintah daerah melaksanakan urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan oleh pemerintah pusat menjadi dasar pelaksanaan otonomi daerah dengan berdasar atas asas tugas pembantuan, Pemerintahan daerah dalam melaksanakan urusan pemerintahan umum yang menjadi kewenangan presiden dan pelaksanaannya dilimpahkan kepada gubernur dan bupati/wali kota, dibiayai oleh APBN.

Dalam pembangunan, partisipasi masyarakat merupakan salah satu elemen proses pembangunan desa sehingga partisipasi masyarakat dalam pembangunan perlu dibangkitkan terlebih dahulu oleh beberapa pihak di antaranya pemerintah desa sehingga adanya keterlibatan pemerintah desa besar kemungkinan masyarakat akan merasa diberikan peluang atau kesempatan untuk ikut serta dalam pembangunan. Partisipasi masyarakat adalah keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan dan pembuatan keputusan tentang apa yang dilakukan, dalam pelaksanaan program dan pengambilan keputusan untuk berkontribusi sumber daya atau bekerjasama dalam organisasi atau kegiatan khusus, berbagi manfaat dari program pembangunan dan evaluasi program pembangunan (Satka, 2015). Partisipasi masyarakat juga dianggap sebagai keikutsertaan masyarakat dalam proses pengidentifikasian masalah dan potensi yang ada di masyarakat, pemilihan dan pengambilan keputusan sebagai alternatif solusi untuk menangani masalah, pelaksanaan upaya mengatasi masalah dan keterlibatan masyarakat dalam proses evaluasi perubahan yang terjadi (Sarifah, 2016)

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 telah memperkuat masyarakat desa sebagai subjek pembangunan. Masyarakat desa memiliki sarana dalam menggalang prakarsa, gerakan dan partisipasi masyarakat desa untuk pengembangan potensi dan aset desa untuk kesejahteraan bersama. Selain itu, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 telah mengakomodasi berbagai partisipasi masyarakat dalam materi muatannya sebagai bentuk pengakuan terhadap otonomi desa mengingat selama ini dalam berbagai macam Undang-undang yang mengatur tentang desa, partisipasi masyarakat tidak diakomodasi. Terdapat tiga bentuk partisipasi, yaitu: partisipasi dalam pembuatan kebijakan, partisipasi dalam pelaksanaan kebijakan dan partisipasi dalam pengawasan kebijakan. Bentuk partisipasi masyarakat tersebut dilakukan dengan tujuan untuk mewujudkan desa yang mandiri sehingga dapat menumbuhkan kesejahteraan desa (Dio, 2015).

Terkait pelaksanaan partisipasi masyarakat di desa, yang dalam hal ini adalah Desa Talawid merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Siau Barat Selatan Kabupaten Siau Tagulandang Biaro Provinsi Sulawesi Utara. Obserfasi awal penelitian menunjukkan bahwa tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa masih harus di tingkatkan hal ini dapat di lihat dari program-program pemerintah yang tidak berjalan dengan baik karena tidak mendapat dukungan penuh dari masyarakat yang di tandai dengan tidak semua masyarakat mau berpartisipasi dalam perencanaan pembangunan. Dan rendahnya pungutan resmi dari desa, menunjukkan kurangnya partisipasi dari segi biaya dari masyarakat, karena masih ada anggapan bahwa semua proyek sudah ada pembiayaannya dari pemerintah yang ada di kampung Talawid.

Adanya kondisi kurang optimal dalam pembangunan di Desa Talawid Kecamatan Siau Barat Selatan Kabupaten SITARO diindikasikan karena kurangnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa. Terkait kondisi demikian, diperlukan strategi pemerintah desa untuk

meningkatkan partisipasi masyarakat karena partisipasi masyarakat sangat menentukan berhasil atau tidaknya pembangunan Desa.

Strategi pemerintah desa dalam hal ini adalah sebagai dinamisator, di mana pemerintah desa harus memiliki kemampuan dalam memberikan bimbingan, pengarahan. Strategi pemerintah desa tersebut, diharapkan dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan terkait pembangunan desa.

TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsep Strategi

- **Pengertian Strategi**

Strategi berasal dari kata Yunani *Strategos*, yang berarti Jenderal. Oleh karena itu kata Strategi secara harfiah berarti "Seni dan Jenderal". Kata ini mengacu pada apa yang merupakan perhatian utama manajemen puncak organisasi. Secara khusus, strategi adalah penempatan misi perusahaan, penetapan sasaran organisasi dengan mengikat kekuatan eksternal dan internal, perumusan kebijakan dan strategi tertentu mencapai sasaran dan memastikan implementasinya secara tepat, sehingga tujuan dan sasaran utama organisasi akan tercapai.

menurut Pearce II dan Robinson (2008:2), strategi adalah rencana berskala besar dengan orientasi masa depan, guna berinteraksi dengan kondisi persaingan untuk mencapai tujuan perusahaan. Dari definisi tersebut, dapat di simpulkan bahwa pengertian dari strategi adalah sebuah tindakan proses perencanaan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, dengan melakukan hal-hal yang bersifat terus menerus sesuai dengan bersama dan berdasarkan sudut pandang kebutuhan pelanggan. Strategi adalah sarana bersama dengan tujuan jangka panjang yang hendak dicapai. Strategi bisnis mencakup ekspansi geografis, deversifikasi, akuisisi, pengembangan produk, penetrasi pasar, pengetatan, devistasi, likuidasi, dan usaha patungan atau joint ventur. Strategi adalah aksi potensial yang membutuhkan keputusan manajemen puncak dan sumber daya perusahaan dalam jumlah besar. Jadi strategi adalah sebuah tindakan aksi atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau perusahaan untuk mencapai sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan Fred R. David (2011:18-19).

Strategi adalah pendekatan secara keseluruhan yang berkaitan dengan gagasan, perencanaan, dan eksekusi, sebuah aktivitas dalam kurun waktu tertentu. Di dalam strategi yang baik terdapat koordinasi tim kerja, memiliki tema mengidentifikasi faktor pendukungnya sesuai dengan prinsip-prinsip pelaksanaan gagasan secara rasional, efisiensi dalam pendanaan dan memiliki taktik untuk mencapai tujuan secara efektif Michael (2002:34) mengatakan bahwa : "Strategi adalah cara untuk mencapai tujuan. mencapai tujuan tertentu". Strategi juga dapat diartikan jalan untuk mencapai suatu tujuan. Untuk mencapai tujuan tersebut bukan saja dibutuhkan kemampuan untuk membangun jalan tersebut dengan baik, dan memberikan keselamatan kepada mereka yang melaluinya, tetapi juga patut melengkapi diri dengan pengetahuan yang akurat tentang *route* yang akan dilalui, atau posisi berdiri kita sendiri dan posisi berdiri dari kekuatan anti perubahan.

Chandler dalam Salusu (2003:35) mengatakan bahwa strategi dapat didefinisikan sebagai penetapan dari tujuan dan sasaran jangka panjang suatu organisasi serta penggunaan serangkaian tindakan dan alokasi sumber daya yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut. Ada 3 komponen penting dalam definisi Chandler, yaitu adanya tujuan dan sasaran, adanya cara bertindak, dan alokasi sumber daya untuk mencapai tujuan itu. Kenneth Andrews merasa kurang puas dengan definisi itu, lantas menggabungkannya dengan ide Drucker dalam satu definisi baru yaitu strategi adalah pola tujuan dan sasaran, yang dinyatakan sedemikian rupa, yaitu yang menegaskan bisnis apa yang digeluti organisasi itu atau yang akan digeluti, dan macam apa atau akan seperti apa organisasi itu.

Menurut Kasmir dalam Fadillah (2013) strategi merupakan langkah-langkah yang harus dihadapi untuk mencapai suatu tujuan. Kadang langkah yang harus dihadapi terjal dan berliku-liku, namun ada juga langkah yang relative muda di hadapi. Selain itu, banyak tantangan maupun cobaan yang harus di hadapi dalam mencapai tujuan. Oleh sebab itu setiap langkah yang di jalankan harus dengan hati-hati dan terarah.

Menurut Siagaan strategi adalah serangkaian keputusan serta tindakan yang mendasar yang di buat oleh manajemen puncak dan diterapkan kesemua jajaran dalam organisasi untuk pencapaian tujuan organisasi.

Menurut Marrus yang dikutip dalam Rahayu (2019:41) strategi didefinisikan sebagai suatu proses penentuan rencana para pemimpin puncak yang berfokus pada tujuan jangka panjang organisasi, disertai penyusunan suatu cara atau upaya bagaimana agar tujuan tersebut dapat dicapai.

Menurut Jatmiko (2003:3) strategi diartikan sebagai suatu cara dimana organisasi akan mencapai tujuan-tujuannya, sesuai dengan peluang-peluang dan ancaman-ancaman lingkungan eksternal yang dihadapi serta sumber daya dan kemampuan internal organisasi. Terdapat tiga faktor yang mempunyai pengaruh penting pada strategi yaitu :

1. Lingkungan eksternal.
2. Sumber daya.
3. Kemampuan internal serta yang akan dicapai.

Artinya strategi adalah sebuah rencana yang telah disusun dengan memanfaatkan segala sumber daya serta peluang-peluang yang ada untuk mencapai tujuan organisasi.

- **Manajemen Strategi**

Manajemen strategi dapat didefinisikan sebagai seni dan pengetahuan dalam merumuskan, mengimplementasikan, serta mengevaluasi keputusan-keputusan lintas fungsional yang memungkinkan sebuah organisasi mencapai tujuannya atau definisi lainnya serangkaian keputusan dan tindakan mendasar yang dibuat oleh manajemen puncak dan di implementasi oleh seluruh jajaran organisasi tersebut. Manajemen strategi adalah sejumlah keputusan dan tindakan yang menaruh pada penyusunan suatu strategi atau sejumlah strategi yang efektif untuk membantu mencapai sasaran perusahaan. Proses manajemen strategi adalah cara dengan jalan para pencari strategi menentukan sarana dan pengambilan keputusan.

Menurut Fred R. David (2011:6) proses manajemen strategi terdiri atas tiga tahap yaitu: Perumusan strategi, penerapan strategi, dan penilaian strategi.

1. Perumusan Strategi Perumusan strategi mencakup penentuan bisnis apa yang akan dimasuki, bisnis apa yang tidak akan dijalankan, bagaimana mengalokasikan sumber daya, perlukah ekspansi atau diverifikasi operasi dilakukan, perlukah perusahaan terjun ke pasar internasional, perlukah maneger atau penggabungan usaha dibuat, dan bagaimana menghindari pengambil alihan yang merugikan. Karena tidak ada organisasi yang memiliki sumber daya yang tak terbatas, para penyusun strategi harus memutuskan strategi alternatif mana yang paling menguntungkan perusahaan.

2. Penerapan Strategi Pada tahap penerapan strategi mengharuskan perumusan untuk menetapkan tujuan tahunan, membuat kebijakan, motivasi karyawan, dan menglokasikan sumber daya, sehingga strategi yang telah dirumuskan dapat dijalankan. Seringkali dianggap sebagai tahap paling sulit dalam manajemen strategi, penerapan atau implementasi strategi membutuhkan disiplin, komitmen, dan pengorbanan personal. Penerapan strategi yang berhasil tergantung pada kemampuan manager untuk memotivasi karyawan, yang lebih merupakan seni dari pada pengetahuan. Strategi tersebut dirumuskan, namun bila tidak diterapkan tidak ada gunanya.

3. Penilaian Strategi Penilaian strategi adalah tahap terakhir dalam manajemen strategi harus tahu kapan ketika strategi tertentu tidak berjalan dengan baik, Penilaian atau evaluasi strategi merupakan cara utama untuk memperoleh informasi semacam ini. Penilaian strategi diperlukan karena apa yang berhasil saat ini tidak perlu berhasil nanti. Keberhasilan senantiasa menciptakan persoalan baru dan berbeda, Organisasi yang mudah berpuas diri akan mengalami kegagalan.

- **Tingkat Strategi**

Dan Schendel dan Charles Hofer (1985:56) menjelaskan adanya 4 tingkatan strategi yaitu :

1. *Enterprise strategi*, strategi ini berkaitan dengan masyarakat. Dalam strategi enterprise

terlihat relasi antara organisasi dan masyarakat luar sejauh interaksi itu akan akan di lakukan sehingga dapat menguntungkan organisasi. Strategi ini juga terlihat sungguh-sungguh berkerja dan berusaha untuk memberi pelayanan yang baik terhadap tuntutan dan kebutuhan masyarakat

2. *Corporate Strategi*, strategi ini berkaitan dengan misi organisasi, sehingga sering di sebut grand strategi yang meliputi bidang yang digeluti oleh suatu organisasi.
3. *Busines Strategi*, strategi ini menjabarkan bagaimana merebut perasaan di tengah masyarakat. Semua itu di maksudkan untuk memperoleh keuntungan-keuntungan stratejik yang sekaligus mampu menunjang berkembangnya organisasi ketingkat yang lebih baik.
4. *Funcional Strategi*, strategi ini merupakan startegi pendukung dan untuk menun jukan suksesnya strategi lain. Ada tiga jenis strategi fungdional yaitu, strategi fungsional ekonomi, strategi fungsional manajemen, strategi isu stratejik.

- **Tipe-Tipe Strategi**

Koteen (1991:28) menjelaskan tentang tipe-tipe strategi yang sering pula dianggap sebagai suatu hierarki. Tipe-tipe strategi yang dimaksud adalah sebagai berikut :

1. *Corparate Strategi*(strategi organisasi). Strategi ini berkaitan dengan perumusan misi, tujuan, nilai-nilai, dan inisiatif-inisiatif stratejik yang baru.
2. *Program Strayegi* (strategi program). Strategi ini lebih memberi perhatian pada implikasi-implikasi stratejik dari suatu program tertentu.
3. *Resource Support Stretegi*(strategi pendukung sumber daya).Strategi ini lebih memberi perhatian pada memaksimalkan pemanfaatan sumber-sumber daya esensial yang tersedia guna meningkatkan kualitas kinerja organisasi.
4. *Institusional strategi*(strategi kelembagaan). Fokus dari strategi ini adalah mengembangkan kemampuan organisasi untuk melaksanakan inisiatif-inisiatif stratejik.

- **Perumusan Strategi**

Hal yang perlu dilakukan oerorganisasi atau perusahaan dalam merumuskan strategi yaitu :

1. Mengidentifikasi lingkungan yang akan di masuki oleh organisasi atau perusahaan di masa depan dan membutuhkan misi organisasi atau perusahaan untuk mencapai visi yang didcita-citakan dalam lingkungan tersebut.
2. Melakukan analisis lingkungan internal dan eksternal untuk mengukur kekuatan dan kelemahan serta sepeluang dan ancaman yang duhadapi oleh perusahaan dalam menjalankan misinya.
3. Merumuskan faktor-faktor ukuran keberhasilan dari strategi-strategi yang di rancangkan berdasarkan analisis sebelumnya.
4. Menentukan tujuan dan target terukur, mengevaluasi berbagai alternatif strategi dengan mempertimbangkan sumber daya yang di miliki dan kondisi eksternal yang di hadapi.
5. Memilih strategi yang pali sesuai untuk mencapai tujuan jangka pendek dan jangka panjang.

Hatten dalam salusu (2003:56) memberi beberapa petunjuk bagaiman suatu strategi sehingga ia bisa sukses:

1. Strategi harus konsikuen dengan lingkungannya.
2. Setiap organisasi tidak hanya membuat suatu strategi. Apabila ada banyak strategi yang dibuat makas strategi yang satu haruslah konsisten dengan strategi yang lain.
3. Strategi yang efektif hendaknya memfokuskan dan menyatukan semua Strategi yang efektif hendaknya memfokuskan dan menyatukan semua sumber daya dan tidak menceraiberaikan suatu dengan yang lain.
4. Strategi hendaknya memusatkan perhatian pada apa yang merupakan kekuatannya dan tidak pada titik yang justru adalah kelemahan.
5. Sumberdaya adalah suatu yang kritis. Mengingat strategi adalah sesuatu yang mungkin membuat suatu yang memang layak dan dapat di laksanakan.
6. Strategi hendaknya memperhintValue resiko yang tidak terlalu besar.
7. Strategi hendaknya disusun di atas landasan keberhasilan yang telah dicapai. Dan jangan

menyusun strategi diatas kegagalan.

B. Konsep Pemerintah Desa

Pemerintah desa merupakan salah satu bagian yang tidak terpisahkan dari sebuah system penyelenggaraan pemerintahan daerah. Sebagai pelayanan terdepan masyarakat, pemerintah desa di harapkan dapat menyelenggarakan pemerintahan sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan yang mengaturnya. Posisi desa yang berada di garis terdepan dalam struktur hierarki pemerintah di daerah, menyebabkan desa di institusi yang paling sering dapat sorotan dari masyarakat. Oleh karenanya, untuk mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat, maka sudah layaknya pemerintah memikirkan cara-cara pelayanan yang memuaskan masyarakat. Pemerintah desa juga bagian dari birokrasi pemerintah modern yang bertugas mengelola barang-barang public termasuk pungutan pajak pada masyarakat. Sebagai institusi modern, pemerintah desa tidak hanya cukup memainkan legitimasi simbolik dan sosial tetapi harus membangun legitimasi yang di bangun dari dimensi kinerja politik dan ekonomi.

Pemerintah merupakan bagian dari negara, unsur-unsur suatu negara pada umumnya terdiri dari wilayah rakyat ,pemerintah dan kedaulatan. Seiring pula unsur di tambah dengan dengan tujuan negara. Dengan kumpulan unsur negara sebagai mana yang telah di jelaskan bahwa pemerintah adalah alat atau sarana dalam mencapai tujuan suatu negara. Dengan demikian makna pemerintahan dan pemerintah akan banyak bergantung kepada isi dari tujuan negara serta cara-cara yang akan dilakukan dalam mencapai tujuan negara tersebut (Hamdi,2002).

Menurut Inu Kencana dalam Fasilah (2013) pemerintah adalah suatu ilmu dan seni, dikatakan sebagai seni karena beberapa pemimpin yang mampu pemerintahan tanpa Pendidikan serta karismatik dalam menjalankan roda sebuah pemerintahan. Sedangkan di katakan disiplin ilmu karena harus memenuhi semua syarat-syarat yang menjadi ketentuan sebuah ilmu, yaitu dapat di pelajari serata diajarkan memiliki objek materi maupun formal, systematis dan spesifik, serta bersifat universal. Menurut soemantri (2011) pemerintah desa terdiri dari pemerintah desa yang di bantu oleh perangkat desa dalam penyelenggaraan pemerintahan, sedangkan perangkat desa yakni terdiri dari sekertaris desa beserta perangkat lainnya dalam pelaksanaan penyelenggaraan teknis lapangan serta penyelenggaraan unsur kewilayaan dengan jumlah yang di sesuaikan berdasdarkan kebutuhan serta kondisi social dan budaya setempat.

Pembanguna desa merupakan bentuk upayah untuk meningkatkan kualitas hidup serta kehidupan masyarakat yang akan memberi dampak untuk kesejahteraan masyarakat desa. Salah satu bentuk pembangun pemerintah desa yakni menciptakan pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat desa merupakan daya dan upaya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan kemandirian dengan cara meningkatkan kemampuan, pengetahuan, keterampilan, sifat, perilaku, serta memanfaatkan segala sumberdaya yang ada melalui program,kebijakan, kegiatan seras pendampingan yang di berikan sesuai dengan pokok masalah ada di dalam masyarakat serta berdasarkan prioritas kebutuhan masyarakat desa.

C. Konsep Partisipasi Masyarakat

• Pengertian Partisipasi Masyarakat

Akhir-akhir ini partisipasi menjadi satu istilah yang cukup penting dan banyak di gugat dalam penyelenggaraan negara. Partisipasi adalah prinsip bahwa setiap orang memiliki hak untuk terlibat dalam pengambilan keputusan disetiap kegiatan penyelenggaraan pemerintah. Partisipasi berasal dari Bahasa Inggris yakni; to participate yang berarti ikut serata ,mengambil bagian atau terkadang juga sebagai berperan serta. Partisipasi masyarakat juga merupakan subangsi sukarela dari masyarakat dalam proses pengambilan keputusan ,dalam menjalankan program, dima mereka ikut menikmati manfaat dari program- program tersebut serta di libatkan dalam evaluasi program agar dapat mengangkat tingkat kesejahteraan mereka. Janabrota (Ndraha, 1990,: 20) mengartikan bahwa” partisipasi sebagai kesediaan untuk membantu berhasilnya setiap program sesuai kemampuan setiap orang tanpa berarti mengorbankan kepentingan sendiri”. Dengan demikian partisipasi masyarakat dapat pula berarti kesediaan untuk membantu keberhasilan suatu kegiatan dengan tidak mengorbankan kepentingan yang

bersangkutan. Hal ini mempunyai pengertian bahwa kesediaan untuk membantu tidak dilakukan secara terpaksa, karena karena proses keterlibatan tersebut disesuaikan dengan kemampuan masing-masing.

Konsep partisipasi oleh para ahli menunjukkan pergeseran paradigma tentang arti partisipasi sebenarnya. Hal ini karena partisipasi yang selama ini terjadi dalam semua keikutsertaan masyarakat di mobilisasi oleh kekuatan tertentu di luar masyarakat itu sendiri. Pemerintah sering menganggap masyarakat adalah kelompok yang lema dan harus menerima apapun yang menjadi kebijakan pemerintah. Hal ini di sebabkan karena pemerintah masih memandang bahwa masyarakat bukan elemen penting dalam dalam proses pembuatan kebijakan, perencanaan dan penganggaran karena suda terwakili di dewan perwakilan rakyat. Klaim ini menyebabkan tidak ada kewajiban dan keinginan yang kuat (terutama dalam level institusiaonal dan oprasioanal) untuk melibatkan masyarakat dan memperhatikan secara sungguh-sungguh keinginan dan harap masyarakat dalam proses pembuatan kebijakan. Ada dasar temuan tersebut ,sangat dibutuhkan instrument kebijakan kepada pemerintah untuk menjamin keterlibatan masyarakat dalam proses pembuatan kebijakan.

Untuk menumbuhkan partisipasi, diprlukan kebijakan pemberdayaan masyarakat, dimana salah satu wujudnya yang ada di desa adalah dengan pembentukan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Suatu tugas dan fungsinya BPD adalah Lembaga yang menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa. Artinya Lembaga ini system kerja komunikasi dua arah yaitu pemerintah desa menawarkan berbagai kebijakan kepada pemerintah desa.

Menurut Canter (1977) dalam Sarajuddin (2006:13) bahwa :
“suatu proses yang melibatkan masyarakat umum, dikenal sebagai peran serta masyarakat, yaitu proses kominikasi dua arah yang berlangsung terus-menerus untuk meningkatkan pengertian masyarakat secara penuh atas suatu proses kegiatan, dimana masalah-masalah dan kebutuhan lingkungan sedang di analisis oleh badan yang berwenang (Canter,1977). Dengan demikian partisipasi masyarakat membutuhkan pemberdayaan sebagai upaya untuk “mengobati” masalah-masalah psikologis masyarakat seperti halnya perasaan ketidak berdayaan, tidak percaya diri dan perasaan bahwa diri mereka bukan komponen penting dalam kehidupan masyarakat.

- **Dimensi Partisipasi Masyarakat**

Pelaksanaan kebijakan pemerintah dalam pembangunan masyarakat tentu membutuhkan partisipasi masyarakat, terutama partisipasi masyarakat yang menjadi sasaran pelaksanaan kebijakan tersebut. Tanpa partisipasi masyarakat, maka efektivitas pelaksanaan kebijakan tersebut angkannya perlu di pertanyakan. Karena itu, dinamika partisipasi masyarakat dalam suatu proses pelaksanaan kebijakan pembangunan dapat juga di pandang sebagai salah satu indikator keberhasilan pelaksanaan kebijakan pembangunan tersebut. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan mempunyai peran yang sangat penting, hal ini didasarkan kepada pertimbangan bahwa masyarakat dapat berperan bukan saja sebagai obyek tetapi juga berperan sebagai subyek pembangunan.

Keith Davis dalam (Sastropoetro, 1988:33) melalui pengertian partisipasi itu sendiri yang mengatakan : partisipasi sebagai keterlibatan mental/pikiran dan emosi/perasaan seorang didalam situasi kolompok dalam usaha mencapai tujuan serta bertanggung jawab terhadap usaha yang bersangkutan.Timpe (2002:89) mengemukakan bahwa, “partisipasi dapat didefinisikan sebagai melakukan oleh, dengan dan lawat orang lain dengan menciptakan situasi dimana mereka terlibat secara mental dan emosi dalam situasi yang mendorong sumbangan yang positif kepada tujuan”

Apabilah menyadari bahwa pembangunan yang di lakukan di desa adalah untuk masyarakat itu sendiri, maka cara yang terbaik adalah mengingatkan masyarakat bahwa pembangunan itu adalah untuk kepentingan mereka sendiri. Pemberitahuan ini tidak selalu dapat berjalan dengan baik, dana hal ini sangat tergantung pada cara-cara pendekatan yang dilakukan. Satu hal yang menjadi catatan bahwa masyarakat tidak merasa memiliki apabila pembangunan tersebut tidak mengikut sertakan mereka. Partisipasi dari masyarakat luas mutlatk di perlukan, oleh karena itu mereka itulah pada akhirnya melaksanakan berbagai objek dab subjek pembangunan. Dengan demikian, dapat di pahami pentingnya partisipasi untuk

menggerakkan masyarakat dalam pembangunan, terutama masyarakat pedesaan yang merupakan bagian penduduk terbesar dari masyarakat Indonesia. Lebih ditegaskan lagi bahwa kegiatan partisipasi masyarakat adalah mutlak diperlukan adanya dalam pembangunan.

Untuk itu perlu ditumbuhkan partisipasi aktif masyarakat yang dilaksanakan dengan menumbuhkan adanya rasa kesadaran dan tanggung jawab masyarakat yang tercermin dengan adanya perubahan sikap mental, pandangan hidup, cara berpikir dan cara bekerja. Pada kenyataannya, tidak semua anggota masyarakat mau berpartisipasi dengan alasan bermacam-macam pula. Hal ini dapat disadari karena beberapa faktor yang mungkin membuat mereka terdorong dalam berpartisipasi. Dorongan yang boleh dikatakan sangat bersifat umum adalah apabila hasil partisipasi tersebut dapat dinikmati langsung oleh mereka sendiri dan memberi keuntungan pada mereka.

D. Konsep Pembangunan Desa

- **Pengertian pembangunan Desa**

Pada hakekatnya pembangunan desa dilakukan oleh masyarakat bersama-sama pemerintah terutama dalam memberikan bimbingan, pengarahan, bantuan pembinaan, dan pengawasan agar dapat ditingkatkan kemampuan masyarakat dalam usaha menaikkan taraf hidup dan kesejahteraannya.

Suparno (2001 : 46) menegaskan bahwa pembangunan desa dilakukan dalam rangka imbang yang sewajarnya antara pemerintah dengan masyarakat. Kewajiban pemerintah adalah menyediakan prasarana-prasarana, sedangkan selebihnya disandarkan kepada kemampuan masyarakat itu sendiri.

Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa. Proses pembangunan desa merupakan mekanisme dari keinginan masyarakat yang dipadukan dengan masyarakat. Perpaduan tersebut menentukan keberhasilan pembangunan seperti yang dikemukakan oleh Ahmadi (2001:222) mekanisme pembangunan desa adalah merupakan perpaduan yang serasi antara kegiatan partisipasi masyarakat dalam pihak dan kegiatan pemerintah di satu pihak. Pembangunan desa tidak terlepas dari konteks manajemen pembangunan daerah baik di tingkat kabupaten maupun tingkat provinsi karena kedudukan desa dalam konteks yang lebih luas (sosial, ekonomi, akses pasar, dan politik) harus melihat keterkaitan antardesa, desa dalam kecamatan, antarkecamatan dan kabupaten dan antar kabupaten.

Pembangunan desa memiliki sebuah peran yang cukup penting dalam proyek pembangunan nasional. Karena pembangunan desa ini cakupannya sangat luas karena merupakan dasar dari sebuah pembangunan. Pembangunan desa ditujukan untuk sebuah peningkatan kualitas hidup dan kehidupan masyarakat desa. Banyak hal yang harus dilaksanakan dalam hal pembangunan desa itu. Dalam pelaksanaan pembangunan desa seharusnya mengacu pada pencapaian tujuan dari pembangunan yaitu mewujudkan kehidupan masyarakat pedesaan yang mandiri, maju, sejahtera, dan berkeadilan. Karena pembangunan desa ini merupakan salah satu agenda besar untuk mengawal implementasi UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa yang dilaksanakan secara sistematis, konsisten, dan berkelanjutan dengan jalan fasilitasi, supervisi, dan pendampingan. Adanya sebuah pembangunan desa ini memiliki peranan yang penting dalam konteks pembangunan nasional. Pembangunan desa ini tidak hanya melulu membicarakan tentang pembangunan fisik saja, namun pembangunan non fisik juga sangat perlu diperhatikan dalam konteks pembangunan. Faktor sumber daya manusia adalah modal utama dalam pelaksanaan pembangunan khususnya pembangunan di desa. Pembangunan masyarakat desa harus diperbaiki dan ditingkatkan untuk menunjang adanya pembangunan desa. Pembentukan karakter masyarakat desa dapat dilakukan dengan diadakannya pengembangan kemampuan sumber daya manusianya sendiri.

Dengan adanya aktivitas-aktivitas yang positif akan dapat meningkatkan kreativitas serta kesadaran lingkungan yang akan semakin tinggi. Pendampingan adalah salah satu hal yang sangat diharapkan oleh pemerintah pusat khususnya Kementerian Desa yang mencetuskan adanya sebuah pendampingan. Karena pendampingan ini bukan hanya mendampingi pelaksanaan proyek yang masuk ke desa, bukan mendampingi dan mengawasi masalah Dana Desa, tetapi yang dimaksudkan adalah pendampingan secara utuh terhadap desa. Disisi lain pemerintah desa memiliki peran yang sangat penting dalam upaya menciptakan lingkup yang mendorong

tumbuhnya prakarsa dan swadaya masyarakat di pedesaan. Pemerintah desa menyanggah peran dalam mengupayakan terciptanya atmosfer yang dapat mendorong kemauan masyarakat untuk bekerja sama membangun pedesaan, dan disisi lain masyarakat juga berperan aktif dalam mengupayakan berjalannya pembangunan dengan maksimal. Sehingga upaya pembangunan di desa ini diharapkan dapat memberikan solusi untuk sebuah perubahan sosial di masyarakat desa sendiri dan memberikan arti desa sebagai sebuah basic perubahan.

- **Tujuan Pembangunan Desa**

Tujuan Pembangunan Desa Dalam sebuah pembangunan desa, maka akan terlaksana dengan baik dan terarah sesuai dengan tujuan awal. Secara khusus dari pembangunan desa sebagai berikut:

- Meningkatkan kemampuan kelembagaan masyarakat di tingkat desa dalam penyusunan perencanaan pembangunan secara partisipatif;
- Meningkatkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat dalam memberikan makna dalam perencanaan pembangunan;
- Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pembangunan; dan
- Menghasilkan keterpaduan antar bidang/sector dan kelembagaan dalam kerangka.

Menurut pendapat lain menjelaskan bahwa tujuan dari pembangunan desa di bagi menjadi 2, yaitu pembangunan desa jangka panjang dan pembangunan desa jangka pendek. Tujuan pembangunan jangka panjang yaitu terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat desa yang secara langsung dilakukan melalui peningkatan kesempatan kerja, kesempatan berusaha dan pendapat berdasarkan pada pendekatan bina lingkungan, bina usaha, dan bina manusia dan secara tidak langsung adalah meletakkan dasar-dasar kokoh bagi pembangunan nasional. Sedangkan tujuan pembangunan desa jangka pendek yaitu peningkatan efektifitas dan efisiensi dalam pelaksanaan kegiatan ekonomi dan dalam pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya alam. Memaknai beberapa pendapat mengenai tujuan pembangunan desa menurut beberapa teori para ahli, bahwasannya hakikat tujuan dari pembangunan desa melalui kegiatan-kegiatan pencapaian dari berbagai bidang (sosial, ekonomi, pendidikan, sarana kesehatan, budaya, agama, politik, dan keamanan) secara berkesinambungan dengan tetap mengedepankan kemaslahatan hak sekaligus tetap menjunjung tinggi keadilan seluruh masyarakat.

- **Perencanaan Pembangunan Desa**

Melakukan misi menjadikan sebuah desa menjadi mandiri ini adalah yang sangat penting membangun suatu hal harus di mulai dengan yang namanya proses pembangunan. Kalau membicarakan masalah maka kita harus mengetahui proses perencanaan pembangunan desa yang baik. Menciptakan sebuah pembangunan desa yang efektif, bukan hanya semata-mata karena adanya kesempatan. Proses perencanaan yang baik maka akan menimbulkan sebuah program yang baik pula. Dan dalam pelaksanaan program tersebut pemerintah akan menumbuhkan partisipasi masyarakat untuk ikut bekerja sama dalam menjalankan program tersebut. Wujud nyata sebuah kewenangan dalam mengatur pembangunan desa adalah pada proses perencanaan, melaksanakan, dan mengevaluasi sendiri kegiatan pembangunan.

Dalam perjalanan kegiatan perencanaan pembangunan seorang pendamping ini harus dapat menjalankan tugasnya dengan baik, dengan hanya ia dapat memahami dinamika masyarakat dan pemerintah desa dalam hal perencanaan pembangunan serta pelaksanaan program-programnya sangat penting di lakukan. Dengan demikian maka ia akan dapat bekerja sama dengan pemerintah desa dan masyarakat secara baik sesuai porsi yang sudah di tentukan. Pemerintah desa dapat menyusun sebuah perencanaan pembangunan desa harus sesuai dengan kewenangannya sebagai pemerintah desa, namun harus mengacu pada perencanaan pembangunan yang sudah di buat di tingkat kabupaten/kota. Pada perencanaan dan pelaksanaan sebuah pembangunan desa, pemerintah desa didampingi oleh pihak-pihak yang lebih kompeten dari pemerintah daerah kabupaten/kota yang secara teknisnya ini dilaksanakan oleh organisasi perangkat daerah (OPD) daerah kabupaten/kota. Sedangkan untuk mengkoordinasikan program pembangunan desanya, kepala desa ini didampingi oleh seorang pendamping profesional. Sedangkan camat akan melakukan koordinasi pendampingan di wilayahnya sendiri.

Perencanaan pembangunan desa disusun secara berjenjang meliputi:

- a. Rencana pembangunan jangka menengah desa (RPJMDes) untuk jangka waktu 6(enam) tahunan.
- b. Rencana pembangunan tahunan desa atau di sebut rencana kerja pemerintah desa (RKP DESA) merupakan penjabaran RPJM desa untuk jangka waktu 1(stau) tahun.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif (Sugiyono, 2017), dengan fokus penelitian mengkaji strategi yang dilakukan oleh pemerintah Desa Talawid dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa. Kajian dilakukan dengan menggunakan pendekatan yang dikemukakan oleh Fred R. David (2011), tentang manajemen strategi. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Data yang diperoleh dianalisis melalui beberapa tahapan, yang diawali dengan melakukan reduksi data, kemudian dilanjutkan dengan melakukan display data, dan diakhiri dengan penarikan kesimpulan.

PEMBAHASAN

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari informan melalui wawancara yang terdiri dari Kepala Desa, BPD dan Masyarakat mengenai Strategi Pemerintah Desa Untuk Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa dilihat dari aspek Perumusan strategi, Penerapan Strategi, dan Penilaian Strategi yang telah dipaparkan sebelumnya sehingga dapat dirangkum sebagai berikut :

1. Aspek Perumusan Strategi
Perumusan Strategi Strategi yang dirumuskan oleh Pemerintah Desa Talawid sudah terealisasi dengan baik walaupun pemanfaatan sumber daya masih kurang pemerintah desa tetap berusaha menstabilkan ekonomi yang ada di Desa Talawid Kecamatan Siau Barat khususnya dalam pembangunan desa.
2. Aspek Penerapan Strategi
Penerapan Strategi Penerapan dari Pemerintah Desa Talawid sudah terencana dengan baik, secara subjektif masyarakat pun merespon positif dengan adanya pembangunan infrastruktur yang akan di lakukan sehingga mereka juga berantusias untuk berpartisipasi dalam pembangunan desa. Namun secara objektif ada juga sebagian masyarakat tidak turut berpartisipasi karena tidak memiliki keterampilan. hal ini karena kurangnya pemberdayaan masyarakat di Desa Talawid seperti Pelatihan Usaha Kecil Menengah. sekalipun anggaran walau dibilang mencukupi namun ketersediaan sarana dan prasarana yang ada di desa talawid sudah cukup memadai dengan baik dan juga masih belum terealisasinya program-program akibat refocusing yaitu karang taruna, pengadaan motor viar (pengangkut sampah).
3. Aspek Penilaian Strategi
Perumusan strategi dan Penerapan strategi yang diterapkan oleh Pemerintah desa sudah berjalan dengan baik walaupun masih ada kendala- kendala yang masih banyak untuk dibenahi, yaitu untuk pemerintah di Desa Talawid untuk meningkatkan retribusi daerah, pajak daerah, serta meningkatkan hasil pengelolaan kekayaan daerah karena suatu pembangunan di desa bergantung pada seberapa banyaknya masyarakat turut berpartisipasi dan jumlah anggaran yang ada. kendala selanjutnya pemerintah perlu mengoptimalkan kembali pembangunan yang ada di desa dengan memanfaatkan sumber daya yang ada sebaik mungkin dengan mengalokasikan dana desa.

Strategi pemerintah desa untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa, dimana Perumusan Strategi, Penerapan Strategi dan Penilaian Strategi yang dapat menjadi salah satu fokus kerja yang harus dimaksimalkan dimana akan selalu berpengaruh pada tingkat partisipasi masyarakat dalam pengembangan pembangunan desa itu sendiri. strategi pemerintah desa mengkordinasikan dengan semua sumber daya melalui proses perumusan strategi, penerapan strategi, dan penilaian strategi untuk mencapai tujuan yang

telah ditetapkan. Untuk mengetahui menggunakan 3 indikator Strategi Manajemen menurut Fred R. David (2006) yaitu:

1. Perumusan strategis Perumusan strategis mencakup pengembangan visi dan misi, identifikasi peluang dan ancaman eksternal suatu organisasi, kesadaran akan kekuatan dan kelemahan internal, penetapan tujuan jangka panjang, pencarian strategi alternatif, dan pemilihan Strategi tertentu untuk mencapai tujuan, Sebagai tolak ukur keberhasilan dan kegagalan maka perumusan selalu dapat di ubah kebijakan pada sesiap saat, maksudnya untuk memperbaiki kesalahan masa lalu dan sebagai alat pedoman untuk pembangunan dimasa mendatang. Dalam perumusan yang di lakukan oleh Pemerintah Desa Talawid memberikan sentiment positif terhadap pembangunan desa namun belum memberikan peluang bagi masyarakat untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan walaupun di saat pandemi Covid-19 tentunya hal ini akan berpengaruh pada tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa. Maka berdasarkan hasil penelitian bahwa Perumusan cukup berjalan dengan baik.
2. Penerapan strategis Penerapan strategis mengharuskan Pemerintah Desa Talawid menetapkan tujuan tahunan, membuat kebijakan, memotivasi, dan mengalokasikan sumberdaya, sehingga strategi-strategi yang telah dirumuskan dapat dijalankan. Penerapan strategis mencakup pengembangan yang supportif pada strategi, penciptaan struktur organisasional yang efektif, pengerahan ulang upaya-upaya pemasaran, penyiapan anggaran, pengembangan serta pemanfaatan system informasi, dan pengairan kompetensi Pemerintah Desa Talawid. Penerapan strategi disebut dengan tahap aksi dari Manajemen strategi. Menerapkan strategi berarti memobilisasi untuk melaksanakan strategi yang telah dirumuskan oleh Pemerintah Desa Talawid. Seringkali dianggap sebagai tahap yang paling sulit dalam Manajemen Strategis, penerapan atau implementasi strategi membutuhkan disiplin, komitmen, dan pengorbanan personal. Oleh karena itu untuk tercapainya tujuan bukan hanya tergantung pada perumusan yang baik, melainkan juga tergantung kepada penerapan sehingga bisa mendapatkan penilaian strategis yang baik pula. Perumusan hanyalah landasan yang kuat untuk adanya penerapan yang terarah sesuai dengan sasaran yang di tuju. Hambatan yang sering di jumpai dalam penerapan adalah kurangnya koordinasi, memang sangat disadari bahwa tugas-tugas mengkoordinasikan antar satu unit dan unit lainnya.
3. Penilaian adalah kinerja dari Pemerintah Desa Talawid. Sedangkan kinerja itu sendiri adalah prestasi dari Pemerintah Desa Talawid yang di hasilkan melalui penerapan strategis dan penerapan staretegi yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Talawid sudah berjalan dengan baik sudah terlealisasikan dengan baik. Penilaian strategis merupakan kinerja dari Pemerintah Desa Talawid setelah melakukan penerapan. Penilaian dapat di ukur dari kualitasnya, efektifitasnya, produktivitasnya, efisiensinya, inovasi, dan kualitas kinerjanya. Khusus yang berkaitan dengan keberhasilan dari penerapan, dapat dijelaskan bahwa Penilaian dapat dikatakan berkualitas jika penerapan berhasil dilakukan, khususnya oleh Pemerintah Desa Talawid yang mampu menunjukkan kemampuannya dalam memuaskan kebutuhan yang ada di Desa Talawid. Maka berdasarkan hasil penelitian bahwa Perumusan dan Penerapan Strategi sudah berjalan cukup baik walaupun ada program pembangunan yang belum di realisasikan karena adanya refocussing anggaran yaitu karang taruna dan pengadaan motor viar. Oleh karena itu pemerintah juga perlu membenahi atau mengevaluasi kembali program-program yang telah di siapkan agar sesuai dengan proses strategi yang akan di lakukan agar mencapai tujuan yang di inginkan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan temuan-temuan di lapangan mengenai Strategi Pemerintah Desa Untuk Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa. maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Tahap perumusan, bahwa Pemerintah Desa Talawid masih kurang inisiatif dalam memberikan usulan strategi untuk sumber daya manusia serta kurangnya inisiatif dalam usulan strategi bagaimana meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa.

2. Dalam tahap penerapan, bahwa Pemerintah Desa Talawid sudah cukup baik dengan terealisasinya berbagai program pembangunan infrastruktur namun masih kurang dalam memanfaatkan sumber daya yang ada hal ini dapat dilihat Pemerintah Desa Talawid masih kurang dalam pemanfaatan retribusi daerah, pajak daerah, peningkatan hasil pengelolaan kekayaan daerah. serta masih kurangnya sarana dan prasarana di Desa Talawid hal tersebut dapat berpengaruh pada tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan yang ada di desa.
3. Tahap penilaian, bahwa Pemerintah Desa Talawid lebih memfokuskan pembangunan infrastruktur sehingga tingkat partisipasi masyarakat terbatas karena kurangnya keterampilan serta kemampuan yang di miliki. Pemerintah Desa Talawid masih kurang dalam hal mendorong masyarakat untuk lebih produktif guna meningkatkan kualitas serta partisipasi masyarakat di Desa Talawid dalam pembangunan dan hal ini menyebabkan strategi yang di gunakan oleh pemerintah terlihat kurang efektif.

DAFTAR PUSTAKA

- Buchori Alma, 2012. *Pengantar Bisnis*. Bandung; Alfabeta.
- David, F.R. 2017. *Manajemen Strategik Suatu Pendekatan Keunggulan Bersaing*. Jakarta: Selemba Empat
- Dio, Z.R. 2015. *Kajian Yuridis Partisipasi Masyarakat dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa*. Artikel Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
- Juraidah. 2015. *Peran Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan di Desa*. *eJurnal Administrasi Negara*, 3(4) 2015: 1145-1157
- Jatmiko, Rammad Dwi. 2003. *Manajemen Strategi*. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang Pres.
- Koteen, J. 1991. *Strategic Management in public and Nonprofit Organisations*. New York : Praeger
- Kuncoro, Mudrajad 2006. *Strategi: Bagaimana Meraih Keunggulan Kompetitif*. Jakarta: Erlangga.
- Michael. Porter. 2002. *Strategi Bersaing (Competitive Strategy)* Penerjemah Rangkuti. Tangerang: Kharisma Publishing.
- Mulyadi. Mohammad, 2019 *Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan masyarakat desa*. Yogyakarta : Nadi Pustaka
- Nawawi Hadari. 2000. *Manajemen Strategi*. UGM Pres Yogyakarta.
- Ruung, A. (2014). *Strategi Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat terhadap Pembangunan Desa di Desa Ammat Kecamatan Tampan Amma Kabupaten Kepulauan Talaud*. *Jurnal Eksekutif Vol 1 No 3 (2014)*.
- Sarifah. (2016). *Peranan Pemerintah Desa untuk Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan di Desa Telaga Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Kutai Timur*. *eJournal Ilmu Administrasi Negara*, 2016.
- Satka, M. H. (2015). *Strategi Pemerintah Desa Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa (Studi Kasus di Desa Kerta Buana Kecamatan Tenggarong Seberang)*. *eJournal Ilmu Administrasi Negara*, 2015, 3 (4) : 1863-1876

Sumber-Sumber Lain :

- Undang-undang No.6 Tahun 2014 Tentang Desa dan Aturan Pelaksanaannya
- Undang-undang Republik Indonesia No.23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah